

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung berdasarkan enam indikator pengukuran kondisi keuangan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 yang telah dilakukan dengan tahapan yang telah ditentukan, beberapa kesimpulan yang didapat yaitu:

1. Secara umum terdapat tiga jenis LKPD yang diperlukan untuk mendapatkan nilai rasio berdasarkan enam indikator pengukuran kondisi keuangan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Neraca, dan Laporan Operasional (LO); serta ditambah dengan data jumlah penduduk.
2. Pengukuran analisis deskriptif rasio berdasarkan enam indikator pengukuran kondisi keuangan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Sijunjung pada tahun 2017-2021 menunjukkan rasio yang baik pada solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas layanan, dan fleksibilitas keuangan. Rasio solvabilitas operasional menunjukkan rasio yang cukup, sedangkan rasio kemandirian keuangan menunjukkan rasio yang kecil (kurang).
3. Hasil pengkategorian indeks kondisi keuangan daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2017-2021 menunjukkan kondisi keuangan Kabupaten

Sijunjung tahun 2021 dikategorikan baik; tahun 2017, 2020, dan 2019 dikategorikan cukup; serta tahun 2018 dikategorikan buruk.

4. Pada indikator solvabilitas operasional adanya peringatan dini terkait tanda-tanda kesulitan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung pada tahun 2018-2021 karena memiliki rasio kecil dari 1.00.
5. Kualitas fleksibilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Sijunjung cukup baik mengantisipasi kenaikan kewajiban akibat pandemi Covid-19
6. Pertumbuhan solvabilitas layanan Kabupaten Sijunjung cenderung kecil setiap tahun selama tahun 2017-2021 hal ini disebabkan karena belanja modal untuk pengadaan aset tetap lebih kecil dari pada belanja operasional yang cukup besar.

1.2 Implikasi Penelitian

Penelitian ini menghasilkan informasi kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Sijunjung berdasarkan enam indikator pengukuran kondisi keuangan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang didapatkan; penelitian ini menyediakan informasi untuk Pemerintah Kabupaten Sijunjung berkaitan dengan kondisi keuangan.

Dari sisi praktis pemerintahan, khususnya Pemerintah Kabupaten Sijunjung, penelitian ini menunjukkan masih adanya kelemahan dalam kemandirian keuangan. Hal ini disebabkan rendahnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung memiliki potensi penerimaan PAD pada sektor pariwisata dengan banyaknya objek wisata, namun hal itu tentunya harus didukung oleh belanja-belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah terutama belanja modal untuk meningkatkan kualitas objek wisata daerah

dalam meningkatkan infrastruktur. Berdasarkan penelitian Pemerintah Kabupaten Sijunjung setiap tahunnya selama tahun 2017-2021 memiliki proporsi belanja operasional lebih besar dibandingkan belanja modal untuk pengadaan aset tetap maupun aset lainnya yang akan memberikan manfaat jangka panjang. Pemerintah Kabupaten Sijunjung harus berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas belanja daerah agar pemberian layanan publik dan pembangunan daerah dapat lebih optimal.

Selanjutnya pada informasi kondisi keuangan, Pemerintah Kabupaten Sijunjung terdeteksi adanya peringatan dini terkait tanda-tanda kesulitan keuangan yaitu kemampuan pendapatan daerah dalam mendanai kegiatan operasional. Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten Sijunjung dengan mengimbangnya melalui peningkatan kenaikan pendapatan setiap tahunnya terutama PAD yang berada dalam kendali Pemerintah Daerah. Selain itu penelitian ini bisa sebagai tambahan informasi terkait penggunaan enam indikator pengukuran kondisi keuangan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020.

Dari segi akademik, penelitian ini memberikan kontribusi pada ilmu akuntansi khususnya akuntansi pemerintah mengenai analisis kondisi keuangan dan indikator kondisi keuangan. Selain itu penelitian ini bisa sebagai tambahan informasi terkait kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Sijunjung baik untuk pemerintahan, masyarakat, maupun untuk pemangku kepentingan lainnya dalam pertimbangan pengambilan keputusan.

1.3 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat keterbatasan dalam penelitian yaitu

1. Penelitian ini hanya berfokus pada satu objek penelitian dan kurun waktu penelitian, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung pada tahun 2017-2021 sehingga belum dapat digeneralisir untuk daerah atau kurun waktu yang lainnya.
2. Penelitian ini juga terbatas pada analisis deskriptif dan pengukuran kondisi keuangan daerah sehingga tidak terlalu menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan suatu daerah.

1.4 Saran

Berdasarkan pernyataan yang telah disebutkan di atas, maka terdapat saran untuk penelitian selanjutnya

1. Lebih mengembangkan penelitian pada objek dan ukuran waktu yang lebih luas seperti melakukan analisis dan membandingkan kondisi keuangan kabupaten dan kota disuatu provinsi sehingga lebih merepresentasikan kondisi keuangan daerah pada cakupan yang lebih luas.
2. Penelitian ini juga terbatas pada analisis deskriptif dan pengukuran kondisi keuangan daerah, sehingga dapat memungkinkan penelitian selanjutnya untuk mengaitkan kondisi keuangan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti faktor sosial ekonomi, faktor politik atau faktor lain yang mempengaruhi. Karena kondisi keuangan daerah juga dapat dipengaruhi oleh perubahan faktor sosial ekonomi atau dinamika politik,

seperti pemilu legislatif, presiden dan pascakonflik secara langsung, bahkan kondisi yang tidak dapat diprediksi seperti bencana alam.

